



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telepon 515865, 515866, 562682
Email :pertanahantataruag@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun pertama setelah berakhirnya masa Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2012-2016. Dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 maka penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017 masih berpedoman pada Renstra SKPD 2012-2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawaan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 serta merupakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, 22 Juni 2017

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul | 1 |
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 19 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD | 21 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 22 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 24 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 26 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 26 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD | 26 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 43 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja OPD untuk tahun 2018.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja OPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada pasal 4 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2029 bahwa Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
3. Harapan hidup masyarakat meningkat;
4. Melek huruf masyarakat meningkat;
5. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
6. Daya saing pendidikan meningkat;
7. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
8. Pendapatan masyarakat meningkat;
9. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
10. Kemiskinan masyarakat menurun;
11. Ketimpangan antar wilayah menurun;
12. Kunjungan wisatawan meningkat;
13. Lama tinggal wisatawan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
18. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016;
20. PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2018.

1.4 Sistematika

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta belum dapat disajikan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 | | | | | | Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2015 | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan | | Catatan |
|----|---|--|---------------------------|--|---|--|----------|---|----------|--------------------------|----------------|--|--|---|---------|
| | | | | | | Target Renja SKPD tahun 2016 | | Realisasi Renja SKPD tahun 2016(TW IV) | | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2016 | Tingkat Capaian realisasi Target Kinerja Renstra | |
| | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = (9/7) | 12 = (10/8) | 13 | 14 | 15 = (14/5) | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta belum apat disajikan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

| NO | Indikator | SPM/ standar nasiona 1 | IK K | Target Renstra SKPD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catata n Analisis |
|-----|--|---------------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | | | 47,90 | 55,83 | 64,25 | 70,58 | 77,25 | 81,97 | 47,90 | | | | | | |
| 2. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | | | 30,07 | 35,07 | 40,08 | 45,08 | 50,08 | 55,08 | 30,07 | | | | | | |

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

3. **Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

4. **Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:**
 - a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
 - b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

5. **Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :**
 - a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
 - 1) pengaturan zonasi;
 - 2) perizinan;
 - 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - 4) penerapan sanksi.

6. **Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 81,97 |
| 2. | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 55,08 |

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah:

| No | Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator Sasaran | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya | 74% |
| 2 | Ketimpangan antar wilayah menurun | Indeks ketimpangan wilayah | 0,517 |
| 3 | Kualitas lingkungan hidup meningkat | Indeks lingkungan hidup | 64 |

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2018
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 921.887.620 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 921.887.620 | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. | UMBULHARJO | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 251.445.000 | Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 251,445,000 | |
| 1.2 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 529.035.676 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 529.035.676 | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | UMBULHARJO | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 141.406.944 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 141.406.944 | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|----------|---|------------|---|----------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 351.315.000 | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 351,315,000 | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | UMBULHARJO | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 207,650,000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 220,100,000 | |
| 2.2 | Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | UMBULHARJO | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 131,215,000 | Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 131,215,000 | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 174.477.832 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 174.477.832 | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|-----|--|------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | UMBULHARJO | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 174.477.832 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 174.477.832 | |
| | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | B | | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | B | | |
| 4 | Program Pengelolaan Pertanahan | | Prosentase tertib administrasi pertanahan. | 68,62% | 19,489,324,248 | Program Pengelolaan Pertanahan | | Prosentase tertib administrasi pertanahan. | 68,62% | 19,489,324,248 | |
| 4.1 | Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | UMBULHARJO | Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. | 70% | 671,137,832 | Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. | 70% | 671,137,832 | |
| | | | Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai. | 100% | | | | Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai. | 100% | | |
| | | | Terdata dan terinventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. | 100% | | | | Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. | 100% | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | <i>terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan</i> | 100% | | | | terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan | 100% | | |
| | | | <i>tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan</i> | 100% | | | | tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan | 100% | | |
| 4.2 | <i>Pemanfaatan Pertanahan</i> | UMBULHARJO | <i>Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta</i> | 8 lokasi | 18,732,556,416 | Pemanfaatan Pertanahan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta | 8 lokasi | 18,732,556,416 | |
| | | | <i>Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan</i> | 100% | | | | Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan | 100% | | |
| 4.3 | <i>Penyelesaian Masalah Pertanahan</i> | UMBULHARJO | <i>Kejelasan status pertanahan</i> | 1 dokumen | 85,630,000 | Penyelesaian Masalah Pertanahan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Kejelasan status pertanahan | 1 dokumen | 85,630,000 | |
| 5 | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. | | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. | 61,40 % | 1.519.040.748 | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. | | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. | 61,40 % | 1.519.040.748 | |
| 5.1 | <i>Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci</i> | Kec. UH | <i>Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.</i> | 1 dokumen | 601,111.416 | Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. | 1 dokumen | 601,111.416 | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|----------|--|-------------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | Kec. UH, JT, GK dan MJ. | Tersedianya kajian dan aturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan. | 2 dokumen | 648,861,416 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan. | 2 dokumen | 648,861,416 | |
| 5.3 | Pembinaan Tata Ruang | Kec. UH | Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta. | 14 kecamatan | 269.067.916 | Pembinaan Tata Ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta. | 14 kecamatan | 269.067.916 | |
| 6 | Program Pengendalian Tata Ruang | | Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang. | 50,25% | 1.211.552.658 | Program Pengendalian Tata Ruang | | Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang. | 50,25% | 1.211.552.658 | |
| 6.1 | Pengendalian Tata Ruang | UMBULHARJO | Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah | 2 dokumen | 285.027.600 | Pengendalian Tata Ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah | 2 dokumen | 285.027.600 | |
| 6.2 | Pengawasan Tata Ruang | UMBULHARJO | Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan. | 5 dokumen | 579.825.058 | Pengawasan Tata Ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan. | 5 dokumen | 579.825.058 | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|-----|---|------------|--|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.3 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | UMBULHARJO | Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang. | 2 dokumen | 346.700.000 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang. | 2 dokumen | 346.700.000 | |
| | TOTAL ANGGARAN | | | | 23.667.598.106 | TOTAL ANGGARAN | | | | 23.667.598.106 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Pemerintah Kota Yogyakarta

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan | Kel. Gedongkiwo | Pengadaan Lahan R. Publik | 300 m2 | Kel. GedongkiwoRW.11 /RT.56 |
| | | Kel. Sryodiningratan | Pengadaan Lahan dan | 300 m2 | Kampung Suryodiningratan |
| | | | Bangunan sebagai RTHP. | | Kel. Suryodiningratan |
| | | Kel. Sryodiningratan | Pengadaan Lahan dan | 940 m2 | Kampung Pugeran |
| | | | Bangunan sebagai RTHP. | | Kel. Suryodiningratan |
| | | Kel. Karangwaru | RTHP | 1 unit | Kelurahan |
| | | Kel. Tegalrejo | Pengadaan FASUM | 700 m2 | RW.05 |

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada OPD hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan. Dan sampai sejauh ini baru mencakup 3 kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah “Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.”

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah “Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat.”

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 55,83 |
| 2. | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 35,07 |

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 55,83 |
| 2. | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 35,07 |

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2018. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 serta Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------|---|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 921.887,620 | 981,956,382 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Makan dan minum yang tersedia untuk | - | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 251,445,000 | 276,589,500 | | |
| | | | | | | | a.koordinasi, | 132 kali | | | | | | |
| | | | | | | | b.pegawai | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | c.Tamu | 180 orang | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--|--|------------|---|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 24 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Materai 6000 yang tersedia | 300 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 529,035,676 | 554,439,244 | | |
| | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 300 buah | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 17 kali | | | | | | | |
| | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 4 unit | | | | | | | |
| | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 15 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 69 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Percetakan | 23 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Penggandaan | 170.000 lbr | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--------|--|----------|---|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundangan-undangan yang tersedia | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 10 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 141.406.944 | 150,927,638 | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--------|---|----------------|---|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 38 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 4 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Naban | 3 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 351,315,000 | 386,446,500 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 1 Jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 220,100,000 | 242,110,000 | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--------|---|-----------|---|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 2.2 | Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 131,215,000 | 144,336,500 | | |
| | | | | | | | a.roda 4 (empat), | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | b.roda 2 (dua) | 15 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 174.477,832 | 178,615,615 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 174.477.832 | 178,615,615 | | |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|---|---------------------------------|-----------------|--|---------|--|-----------------|--|--------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 4 | Program Pengelolaan Pertanahan | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Tertib administrasi pertanahan. | | Prosentase tertib administrasi pertanahan. | 28.40 % | | | | | 19.489.324.248 | 28.622.,765,000 | | |
| 4.1 | Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | | | Kota Yogyakarta | | | Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta | 25 bidang tanah | Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. | 70% | 671,137,832 | 450,000,000 | | |
| | | | | | | | Pelacakan dan inventarisasi tanah negara/Pemkot sepanjang pinggir sungai. | 3 Kelurahan | Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. | 9 Kelurahan | Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. | 100% | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------------------|--------|---|-------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan | 1 dokumen | terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | database sistem inventarisasi pertanahan | 1 dokumen | tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan | 100% | | | | |
| 4.3 | Penyelesaian Masalah Pertanahan | | | Kota Yogyakarta | | | Penyelesaian masalah pertanahan | 1 dokumen | Kejelasan status pertanahan | 1 dokumen | 85,630,000 | 72,765,000 | | |
| | | | | | | | Pencegahan Permasalahan Pertanahan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Prosentase Pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum | 94.40 % | | | | | | |
| 4.2 | Pemanfaatan Pertanahan | | | Kota Yogyakarta | | | Pengadaan tanah pembangunan kantor. | 2 kelurahan | Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta | 8 lokasi | 18,732,556,416 | 28,100,000,000 | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|---|--|-----------------|---|---------|---|---------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan tanah untuk RTHP | 3 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. | 3 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara. | 60 Permohonan | Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan | 100% | | | | |
| 5 | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan. | | Persentase Penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang. | 63.24 % | | | | | 1,519,040,753 | 1,592,731,000 | | |
| 5.1 | Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | | | Kota Yogyakarta | | | Naskah Akademik Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota | 1 dokumen | 601,111,416 | 631,240,500 | | |
| | | | | | | | Draft Album Peta Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------------------|--|--|-----------|--|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 1 dokumen | Yogyakarta. | | | | | |
| | | | | | | | Draft Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | | | Kota Yogyakarta | | | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) | 2 dokumen | Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan. | 2 dokumen | 648,861,421 | 678,990,500 | | |
| | | | | | | | Draft Perwal RTBL | 2 dokumen | | | | | | |
| 5.3 | Pembinaan Tata Ruang | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Telaah Penataan Ruang | 1 dokumen | Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta. | 14 kecamatan | 269.067,916 | 282.500,000 | | |
| | | | | | | Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta | 1 peraturan | | | | | | | |
| | | | | | | Kajian Potensi Pengembangan Sistem Pedestrian Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Kajian Evaluasi dan Identifikasi Potensi Rumah Susun di Kota Yk. | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|---|--|-----------------|--|---|---|-----------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 6 | Program Pengendalian Tata Ruang | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan. | | Persentase Penilaian Pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan tata ruang. | 22.56 % | | | | | 1,213,577,658 | 1,396,360,173 | | |
| 6.1 | Pengendalian Tata Ruang | | | Kota Yogyakarta | | | Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. | 1 dokumen | Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah | 1 dokumen | 285,027,600 | 375,157,610 | | |
| 6.2 | Pengawasan Tata Ruang | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) | 1 dokumen | Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan. | 5 dokumen | 579.825.058 | 637.807.563 | | |
| | | | | | | Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan Ruang. | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas daerah | Sasaran | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|---|------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|-----------|--|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Neraca Penatagunaan Tanah. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.3 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | | | Kota Yogyakarta | | | Kajian Database Spasial Penataan Ruang | 1 dokumen | Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang. | 2 dokumen | 346.700.000 | 381.370,000 | | |
| | | | | | | Updating Peta Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) | 1 Laporan | | | | | | | |
| | TOTAL ANGGARAN | | | | | | | | | | 23,667,598,106 | 33,156.849.670 | | |

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 22 Juni 2017

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 19640126 199303 1 005